

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2013-2018 adalah merupakan revisi Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2009-2013, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun regional.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Mengingat hal tersebut, maka semua unsur pimpinan dan staf dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*), untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat Sejahtera Berbasis Pangan Lokal”** untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi NTB yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”**.

Mengingat pesatnya perubahan lingkungan internal dan eksternal serta tingginya tuntutan terhadap kinerja pembangunan ketahanan pangan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap Renstra setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Mataram, 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. Hj. Budi Septiani
Pembina Utama Muda
NIP. 19610930 199803 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra SKPD	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II-1
2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola	II-2
2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	II-3
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	III-1
3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait Dengan Pelayanan SKPD	III-1
3.2. Hasil-Hasil Yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya	III-6
3.3. Analisis Isu Strategis Terkait Dengan Tugas dan Fungsi SKPD	III-21
3.4. Analisis Lingkungan Strategis	III-28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1. Visi dan Misi	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.3. Strategi dan Kebijakan	IV-4
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram, serta sejahtera lahir dan batin, semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat strategis.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025, pada tahap ketiga periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 pembangunan daerah difokuskan pada upaya "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya **menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan**, serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi".

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah harus menyusun RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi NTB 2014-2018, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM dan bersifat indikatif.

Sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1) politik; 2) teknokratik; 3) partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*); dan 5) bawah-atas (*bottom-up*).

1. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Perencanaan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Perencanaan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Sedangkan Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni : 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134).
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sebagai pembaharuan Revisi Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 untuk memberikan arah bagi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam program dan kegiatan beserta besaran dan tahapan pencapaiannya, serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah terformulasinya program dan kegiatan sebagai acuan dalam pembangunan ketahanan pangan.

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra OPD

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 Bab, secara garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Dasar Hukum Penyusunan**
- C. Hubungan Antar Dokumen**
- D. Sistematika Penulisan**
- E. Maksud dan Tujuan**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**
- B. Sumber daya OPD**
- C. Kinerja Pelayanan OPD**

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

- A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- E. Penentuan Isu-isu Strategis**

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	A. Perumusan Visi dan Misi
	B. Perumusan Tujuan dan Sasaran
	C. Perumusan Strategi dan Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tugas pokok Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari

1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
2. Seksi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :

1. Seksi Distribusi Pangan; dan
2. Seksi Cadangan Pangan.

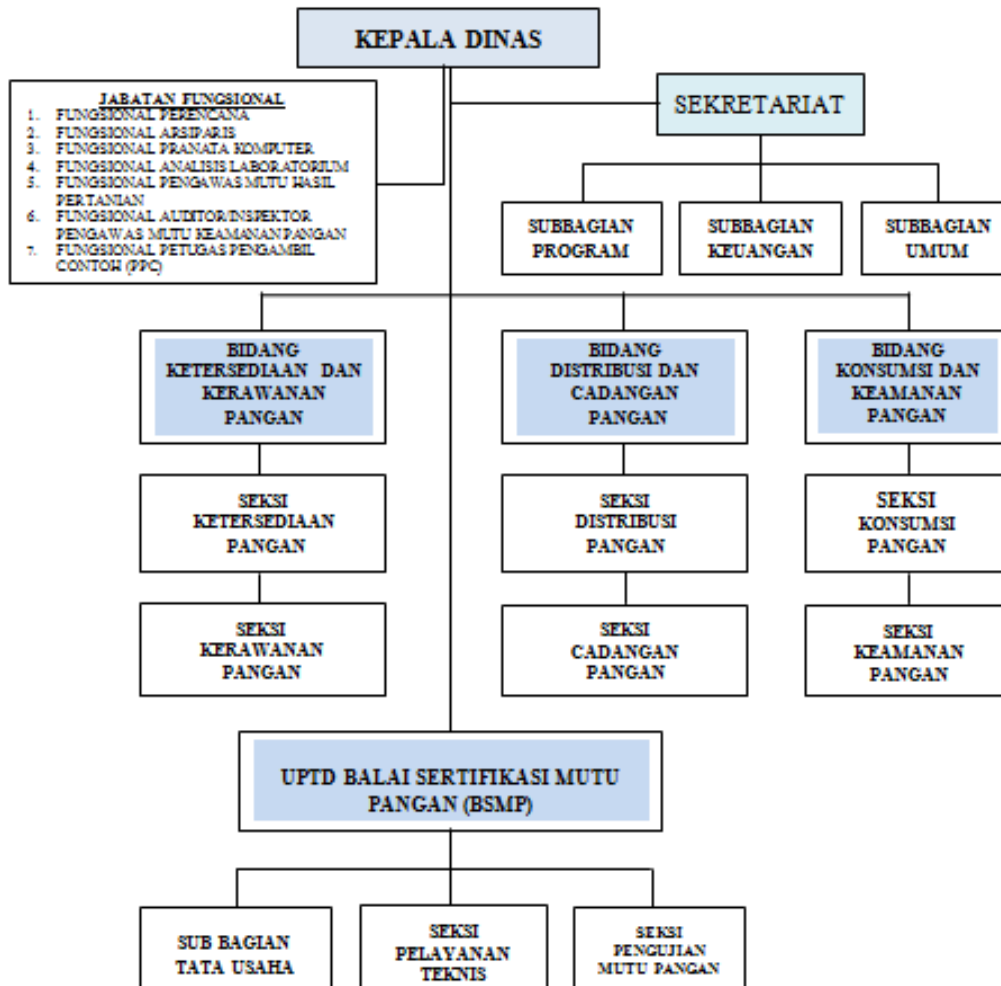
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :

1. Seksi Konsumsi Pangan; dan
2. Seksi Keamanan Pangan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi NTB



B. SUMBER DAYA OPD

1. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, baik tugas rutin maupun kegiatan yang telah terprogram dalam upaya pencapaian kinerja, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB didukung oleh 66 orang pegawai. Komposisi sumberdaya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan, golongan kepangkatan, maupun kelompok usia pada tahun 2016 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai DKP NTB Berdasarkan Golongan Tahun 2016

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	CPNS	-	-	-	-	-
2.	PNS	3	12	38	12	63
3.	Jabatan Fungsional	-	-	1	2	3
4.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	10	40	13	66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2016

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai DKP NTB Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Pendidikan	CPNS	PNS	Kelompok Fungsional	Honorer	Jumlah
1.	Doktor	-	-	-	-	0
2.	Strata 2	-	12	-	-	12
3.	Strata 1	-	33	3	-	36
4.	D3	-	1	-	-	1
5.	SLTA	-	12	-	-	12
6.	SLTP	-	3	-	-	3
7.	SD	-	2	-	-	2
	Jumlah	-	63	3	-	66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2016

Tabel 2.3
Inventaris Asset Tetap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Tahun 2016

No	Kode	Nama	Jumlah		Kondisi Barang		
Urut	Barang	Barang	Barang	Satuan	B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
TANAH:							
1	01.11.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.765	M2	B	-	-
PERALATAN DAN MESIN							
1.	Alat-alat Angkutan						
	19.01.01.03	Kendaraan Roda-4	11	Unit	9	-	2
	19.01.01.03	Kendaraan Roda-2	59	Unit	50	4	5
	Jumlah Alat-Alat Angkutan		70	Unit	59	4	7
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga						
	12.02.04.03	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	706	-	653	-	53
		Alat ukur	1				
3	Alat-alat Komputer		12	Unit	8	-	2
4	Alat Studio dan Komunikasi						
	13.02.01.05	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	30	-	20	2	8
GEDUNG DAN BANGUNAN							
1	Bangunan Gedung						
	06.01.02.01	Gedung Kantor	49	M2	B		
	06.01.02.01	Gedung Kantor Utama	513	M2	B		
	06.01.02.01	G.Bid.Keter. Pangan	1.103	M2	B		
	06.01.02.01	G.Bid Kewas. Pangan	299	M2	B		
	06.01.02.01	Ged.Bid.Distri. Pangan	135	M2	B		
	06.01.02.01	Ged.Bid.Keam. Pangan	378	M2	B		
	06.01.02.01	Parkir	80	M2	B		
	06.01.02.01	Mushalla	34	M2	B		
	06.01.02.01	RD	24	M2	B		
	06.01.02.01	Tower Bangunan Air	1	Unit	B		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2016

2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

1. Jenis Pelayanan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang harus dilaksanakan oleh Provinsi yaitu :

a. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : 1) produksi dalam daerah, 2) pemasokan pangan, dan 3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang terus meningkat serta belum seluruh masyarakat memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang baik, maka semangat untuk menjadi daerah yang mandiri dalam penyediaan pangan harus terus diupayakan dari produk dalam daerah dengan memanfaatkan potensi lokal daerah.

Pengelolaan cadangan pangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena

merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat Provinsi pencapaian standar pelayanan ketersediaan pangan dan cadangan pangan diukur melalui indikator penguatan cadangan pangan yang ditartetkan minimal sebesar 60% dari 200 ton ekuivalen beras pada akhir tahun 2015.

b. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin

agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan masih sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani.

Hal tersebut menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain : 1) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, 2) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, 3) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, 4) keterbatasan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.

Kebijakan yang mendasari kegiatan penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk : 1) mendukung upaya petani memperoleh harga produk yang lebih baik, 2) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, 3) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan ditingkat Provinsi adalah ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan sebesar 100% pada akhir tahun 2015.

c. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (*food utility*) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energy, protein, vitamin dan mineral serta aman.

Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dinimelalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik

akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata perkapita perhari untuk energy 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram. Sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, Provinsi NTB telah membentuk Institusi resmi yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam rangka penanganan keamanan pangan segar, terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Kegiatan yang dilakukan otoritas kompeten dalam bentuk kesisteman dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang dihasilkan petani dimasing-masing wilayah dalam bentuk sertifikasi dan pelabelan.

Wujud pengakuan dari pemerintah dalam pemenuhan aspek keamanan pangan bagi produk pertanian segar dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan pemenuhan terhadap cara-cara budidaya yang benar, yaitu :

- Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi
- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik
- Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Alabila hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada : 1) membanjirnya produk buah dan sayur segar dari luar negeri, 2) produk pertanian lokal kurang laku dan tidak menjadi pilihan baik domestik maupun internasional, 3) daya saing produk semakin rendah dan 4) kerugian ekonomi semakin besar.

Indikator pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan pada tingkat provinsi adalah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, yang menggambarkan jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dipedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, dengan target capaian 80% pada tahun 2015.

d. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan standar fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena : 1) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 2) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 3) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, 4) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya.

Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi,

pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan : 1) pengembangan isyarat dini, 2) penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan, 3) pencegahan kerawanan pangan, 4) penanggulangan kerawanan pangan dan 5) peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan. Capaian pelaksanaan indikator penanganan daerah rawan sebesar 60% pada tahun 2015.

2. Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan dasar tersebut, kelompok sasaran yang menjadi fokus perhatian berbeda-beda sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator pada masing-masing pelayanan :

a. Pelayanan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Didukung melalui kegiatan antara lain :

- 1) Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan provinsi.
- 2) Menyusun analisis ketersediaan dan kerawanan pangan
- 3) Penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi kabupaten/kota
- 4) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- 5) Penanggulangan kerawanan pangan melalui intervensi bantuan sosial berdasarkan hasil investigasi Tim SKPG

- 6) Menyediakan informasi yang mencakup :
- a) Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut, daerah kepulauan, daerah terpencil di kabupaten/kota.
 - b) Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggilingan yang mudah diakses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan.
 - c) Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/kota
 - d) Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah terpencil)
 - e) Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, dll)
 - f) Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, dll

b. Pelayanan Dasar Distribusi dan Cadangan Pangan

Didukung melalui kegiatan antara lain :

- 7) Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), bertujuan untuk menjamin petani memperoleh harga pembelian gabah/beras minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, dengan kelompok sasaran petani dan kelompok tani

yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan)

- 8) Melakukan pengumpulan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi dan akses pangan
- 9) Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan
- 10) Pengembangan lumbung pangan, yang bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri, dengan kelompok sasaran masyarakat didaerah non sentra pangan
- 11) Pengembangan cadangan pangan pemerintah, yang bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan pemerintah dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien, dengan kelompok sasaran masyarakat yang mengalami masalah pangan.

c. Pelayanan Konsumsi dan Keamanan Pangan

Didukung melalui kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi dan apresiasi penanganan keamanan pangan penyusunan dan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha
- 2) Workshop penanganan keamanan pangan segar. Dengan kelompok sasaran pelaku usaha
- 3) Pembinaan keamanan pangan, kepada pelaku usaha
- 4) Sertifikasi dan pelabelan pangan, pada pelaku usaha
- 5) Pengawasan penanganan keamanan pangan pada pelaku usaha

- 6) Penyuluhan keamanan pangan, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar.
- 7) Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan
- 8) Pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen
- 9) Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi
- 10) Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait Dengan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan asas :1) kedaulatan; 2) kemandirian; 3) ketahanan; 4) keamanan; 5) manfaat; 6) pemerataan; 7) berkelanjutan; dan 8) keadilan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan
6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
7. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
8. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan yang ada

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut Pemerintah bertugas 1) menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan daerah, 2) menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka

penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok, 3) menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu dan penganekaragaman pangan, dan 4) mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, dalam rangka menjamin berjalannya subsistem ketahanan pangan.

Secara umum, situasi ketahanan pangan daerah pada periode 2009-2013 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain : 1) produksi komoditas pangan penting khususnya beras cenderung meningkat, 2) kondisi harga bahan pangan cenderung lebih stabil baik diluar maupun menjelang hari besar keagamaan (puasa, idul fitri, natal, dan tahun baru), 3) meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya daya beli petani, 4) kualitas konsumsi masyarakat yang meningkat, 5) peran serta masyarakat dan pemerintah daerah meningkat, 6) menurunnya angka kemiskinan penduduk.

Berbagai indikator tersebut memberikan gambaran, bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan ketahanan pangan selama ini telah memberikan dampak positif terhadap berjalannya subsistem ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem keterjangkauan pangan dan subsistem

konsumsi pangan dan gizi yang pada gilirannya diharapkan dapat menjamin tercapainya ketahanan pangan wilayah.

1. Ketersediaan Pangan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan dilakukan melalui :

- a. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal
- b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan
- c. Mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan
- d. Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan
- e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif
- f. Membangun kawasan sentra produksi pangan

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah melakukan banyak hal antara lain dalam rangka mempertahankan luas lahan sawah berkelanjutan telah dirancang regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Beras sebagai komoditas pangan pokok ketersediaannya terus menjadi perhatian, upaya untuk terus berswasembada, dilakukan melalui : **1) perluasan areal tanam**, untuk meningkatkan luas panen, dilakukan melalui perluasan areal tanam, dilakukan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), perعتakan sawah baru dan optimalisasi lahan; **2) peningkatan**

produktifitas, dilakukan melalui introduksi paket teknologi, seperti : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), Sekolah Lapang Pengelolaan Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I). Di dalam pelaksanaan SL-PTT, dilakukan penggantian varietas dari varietas potensi rendah ke varietas potensi sedang, potensi sedang ke potensi tinggi dan potensi tinggi ke benih hibrida. Disamping itu dilakukan juga pergiliran jalur benih antar lapang dan antar musim (Jabalsim) untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap gangguan iklim dan organisme pengganggu tanaman (OPT); **3) pengamanan produksi**, untuk menekan kehilangan hasil akibat gangguan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman dilakukan melalui : Sekolah Lapang Pengelolaan Hama Terpadu (SL-PHT), Sekolah Lapang Iklim (SL-I), Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida serta Screening Pestisida baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi NTB terus berupaya mengelola stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

2. Keterjangkauan Pangan

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, yang dilakukan melalui penerapan kebijakan dalam hal : a) distribusi, b) pemasaran, c) perdagangan, d) stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta e) bantuan pangan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Distribusi pangan**, dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan keseluruhan wilayah secara berkelanjutan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau yang dilakukan antara lain melalui :
- 1) Pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif efisien
 - 2) Pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat
 - 3) Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan
 - 4) Memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk pangan
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan, terutama pangan pokok
 - 6) Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- b. **Pemasaran pangan**, dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan yang bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tatacara pemasaran yang baik, serta memfasilitasi dalam berbagai event promosi.
- c. **Perdagangan pangan**, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengaturan perdagangan pangan yang bertujuan untuk :

- 1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pangan pokok
- 2) Manajemen cadangan pangan
- 3) Penciptaan iklim usaha pangan yang sehat

d. **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok**, menjadi kewajiban pemerintah daerah baik ditingkat produsen dan konsumen, yang dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Hal ini dilakukan melalui :

- 1) Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah
- 2) Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah
- 3) Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah
- 4) Pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan
- 5) Pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah
- 6) Pengaturan keluar dan masuk pangan

e. **Bantuan Pangan**, merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat.

Dalam hal menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat di Provinsi NTB, beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain : a) melakukan pemantauan perkembangan harga pangan yang dilakukan setiap minggu untuk 12 komoditas pangan pokok di 10 kabupaten/kota, b). Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pokok, c) Pemantauan arus komoditas strategis pangan yang masuk dan keluar Provinsi NTB.

3. Konsumsi Pangan dan Gizi

Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui :

- a. Penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
- b. Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
- c. Pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman

Upaya mewujudkan penganekaragaman konsumsij pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif diarahkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain :

- a. Mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang
- c. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal
- d. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Hal penting lainnya yang menjadi fokus perhatian terkait konsumsi pangan adalah keamanan pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam hal menjamin keamanan pangan dan mutu pangan, Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan, yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan segar. Hal ini dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan melalui lembaga sertifikasi yang terakreditasi untuk memberikan sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.

3.2. Hasil-Hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan pada periode lima tahun sebelumnya, menunjukkan progres yang membaik. Hasil capaian kinerja lima tahun sebelumnya terkait subsistem ketahanan pangan disampaikan sebagai berikut :

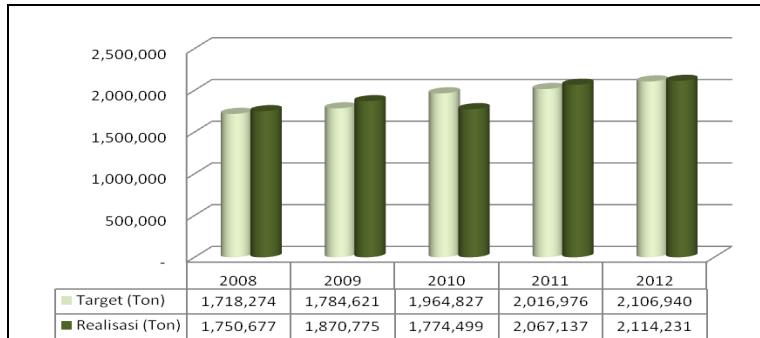
1. Ketersediaan Pangan

Beberapa indikator yang menjadi ukuran pencapaian kinerja ketersediaan pangan selama lima tahun terakhir disampaikan sebagai berikut :

a. Perkembangan Produksi Pangan

Produksi padi di NTB tahun 2012 berdasarkan Angka Sementara Daerah (ASEMDA) Badan Pusat Statistik Provinsi NTB sebesar 2.114.231 ton gabah kering giling meningkat 20,77% dari produksi tahun 2008 sebesar 1.750.677 ton gabah kering giling, dengan peningkatan rata-rata produksi tahun 2008-2012 mencapai 5,12% pertahun. Peningkatan produksi padi tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 disebabkan meningkatnya luas panen sebesar 1,47% yaitu dari 418.062 ha tahun 2011 menjadi 424.218 ha tahun 2012, meningkatnya produktivitas padi sebesar 0,22% dari 49,45 kw/ha tahun 2011 menjadi 49,56 kw/ha tahun 2012. Perkembangan produksi padi tahun 2008-2012, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1
Perkembangan Produksi Padi Provinsi NTB Tahun 2008-2012

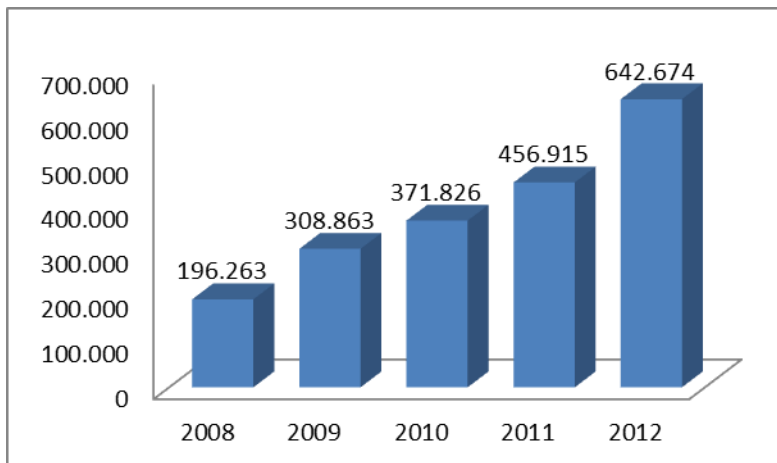


Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Tahun 2013

Tahun 2010 produksi padi sebesar 1.774.499 ton GKG (90,31%) dibawah target 1.964.827 ton GKG, disebabkan karena adanya anomali iklim yang melanda Indonesia termasuk NTB, yang menyebabkan kekeringan 48.189 ha dan puso 22.605 ha.

Produksi jagung tahun 2012 berdasarkan Angka Sementara Daerah (ASEMDA) Badan Pusat Statistik Provinsi NTB sebesar 642.674 ton meningkat 227,46% dari produksi tahun 2008 yang mencapai 196.263 ton, dengan rata-rata peningkatan produksi tahun 2008-2012 mencapai 35,32% pertahun. Perkembangan produksi jagung disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Perkembangan Produksi Jagung
di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008-2012



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Tahun 2013

b. Ketersediaan Energi dan Protein

Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), ketersediaan energi dan protein yang siap dikonsumsi masyarakat NTB tahun 2008-2013 meningkat masing-masing 9,71 % dan 3,32% pertahun. Ketersediaan energi terendah sebesar 3.077,58 Kalori/kapita/hari pada tahun 2008 namun masih diatas ketersediaan energi minimal yang dipersyaratkan sebesar 2.200 Kalori/kapita/hari. Begitupun Angka Kecukupan Protein terendah ditahun 2008 sebesar 93,8 gr/kapita/hari juga masih diatas ketersediaan protein minimal 57 gr/kapita/hari. Hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan pangan di Provinsi NTB dalam kondisi tersedia sepanjang tahun.

Ketersediaan energi tahun 2013 mencapai 4.745,00 Kalori/kapita/hari meningkat 40,89% dari kondisi tahun 2008 dan ketersediaan protein meningkat 13,10% dari kondisi tahun 2008 menjadi 126,56 gr/kapita/hari di tahun 2013, melampaui target tahun 2013 untuk energi 3.105,38 Kalori/kapita/hari dan protein 104,53 Gr/kapita/hari. Perkembangan ketersediaan energy dan protein Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi NTB
Tahun 2009-2013

NO	INDIKATOR RPJMD	URAIAN	CAPAIAN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Ketersediaan Energi (Kalori/Kapita/Hari)	Target	3.083,12	3.088,67	3.094,23	3.099,80	3.105,38
		Realisasi	3.367,97	3.559,25	3.343,04	4.354,24	4.745,00
		(%)	109,24	115,24	108,04	140,47	141,62
2	Ketersediaan Protein (gr/Kapita/Hari)	Target	95,85	97,95	100,1	102,29	104,53
		Realisasi	111,9	117,08	114,49	129,54	126,56
		(%)	116,74	119,53	114,38	126,64	125,17

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

c. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat tahun 2009 sebanyak 521 ton meningkat pada tahun 2010 menjadi 594,92 ton dan pada tahun 2012 mencapai 1.161,85 ton (109,61%) melampaui target 1.060 ton dan pada tahun 2013 mencapai 1.373 ton melampaui target 1.325 ton yang

dapat digunakan bagi pemenuhan pangan masyarakat yang mengalami kerentanan pangan baik kronis maupun transien. Dari jumlah tersebut termasuk cadangan pangan Pemerintah Provinsi NTB sebesar 167,042 Ton Beras, melampaui target SPM sebesar 60% dari 200 ton beras.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyediaan cadangan pangan baik pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat. Sampai dengan Desember 2013, cadangan pangan yang dikelola sebesar 1.373,04 Ton GKG dengan rincian :

- provinsi GKG Cadangan Pangan : 257,245 Ton
- Kabupaten GKG Cadangan Pangan : 134,812 Ton
- LDPM GKG Cadangan pangan di : 190,620 Ton
- LUEP GKG Cadangan Pangan di : 173,896 Ton
- DAK GKG Cadangan Lumbung : 405,866 Ton
- Dekon GKG Cadangan Lumbung : 133,333 Ton
- CSR Pegadaian : 9,090 Ton GKG
- Pesisir, Pegunungan Lumbung APBD : 68,180 Ton GKG

d. Desa Mandiri Pangan

Pengembangan desa mandiri pangan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin di daerah rentan

pangan agar mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Selama periode tahun 2009-2013 Jumlah desa mandiri pangan yang dibentuk sebanyak 229 desa, bertambah 147 desa dari kondisi awal 82 desa di tahun 2008. Melalui pemberdayaan masyarakat miskin di desa mandiri pangan, diharapkan masyarakat mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Jumlah desa mandiri pangan berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Desa Mandiri Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008-2013

Tahun	KAB/KOTA										Jml
	Lobar	Loteng	Lotim	KSB	Sumbawa	Dompu	Bima	Kota Bima	KLU	Kota Mtr	
2008	6	6	8	5	27	15	15	0	0	0	82
2009	2	2	2	2	2	2	2	3	0	3	20
2010	3	3	6	5	3	3	3	3	3	4	36
2011	4	1	3	3	4	7	4	1	2	2	31
2012	4	3	4	2	3	3	2	3	3	3	30
2013	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Jumlah	22	18	26	20	42	33	29	13	11	15	229

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

e. Lumbung Pangan Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat terus dibangun agar dapat mengantisipasi terjadinya kerentanan pangan secara dini dilingkungannya. Untuk itu, Pemerintah telah mengembangkan dan membangun lumbung-lumbung pangan masyarakat dan penguatan cadangan pangan

masyarakat agar masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri. Perkembangan lumbung pangan di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Perkembangan Lumbung Pangan Provinsi NTB
Tahun 2009-2013

Kab/ Kota	2009	2010	2011		2012		2013			Jml
	APB N	APB N	APB N	AP BD	APBN	APBD	APBN	APBD		
								Modern	Tradi- sional	
Lobar	2	2	-	-	6	2	2	1	10	25
KLU	-	-	1	1	4	2	-	1	20	29
Loteng	2	2	2	-	14	2	1	2	32	57
Lotim	2	2	2	1	16	2	2	1	15	43
Sumbawa	1	1	1	-	6	2	-	2	19	32
KSB	1	1	1	-	2	2	1	1	20	29
Dompu	1	1	2	-	6	2	-	1	20	33
Bima	2	2	1	-	13	2	-	1	24	45
Mataram	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Kota Bima	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
NTB	11	11	10	3	67	20	6	10	160	298

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

2. Keterjangkauan Pangan

Beberapa indikator yang menjadi ukuran pencapaian kinerja keterjangkauan pangan selama lima tahun terakhir disampaikan sebagai berikut :

a. Informasi Harga Pangan

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain melalui pemantauan harga pangan di tingkat konsumen dan pemantauan harga pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN). Selain karena permintaan dan penawaran, karakteristik komoditas pangan yang sangat tergantung pada musim menyebabkan stabilitas harga pangan akan sulit untuk stabil terkait jumlah pasokan yang dapat disediakan ke pasar.

Pemantuan informasi harga pangan dilaksanakan di Pasar Induk Mandalika dan Pasar Raya Kabupaten/Kota se NTB, dengan tujuan untuk :

- 1) Mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan harga pangan,
- 2) Mengetahui keragaman harga pangan antar wilayah dan antar waktu terhadap ekonomi rumah tangga,
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan harga ditingkat konsumen atau harga yang berlaku di pasar induk dan pasar raya kabupaten/kota se NTB sebagai bahan pertimbangan pelaku usaha dibidang pangan.

Perkembangan harga pangan selama tahun 2010-2012 di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perkembangan Harga Pangan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2012

No	Komoditas	Harga (Rp)			Peningkatan Pertahun (%)
		2010	2011	2012	
1	Gabah (GKP)	2.950	2.986	3.903	15,97
2	Beras (IR 64)	6.321	6.885	7.881	11,69
3	Jagung	3.469	4.990	4.000	12,00
4	Kedelai	6.667	6.981	8.061	10,09
5	Daging Sapi	65.792	65.413	75.701	7,58
6	Daging Ayam	24.038	25.317	27.685	7,34
7	Telur (ayam ras)	874	1.069	1.040	9,80
8	Minyak Goreng (curah)	9.583	10.359	11.425	9,19
9	Gula Pasir	10.563	10.844	12.017	6,74

10	Cabe Rawit	23.013	36.726	17.745	3,95
----	------------	--------	--------	--------	------

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan harga rata-rata komoditas pangan dari tahun 2010-2012 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan harga untuk beras medium mencapai 11,69%,
- 2) Komoditas pangan lainnya yang juga mengalami peningkatan harga adalah jagung pipilan 12,00%, kedelai lokal 10,09%, minyak goreng curah 9,19%, daging sapi 7,58% dan cabe rawit 3,95%.

Secara umum rata-rata harga pada semua komoditas pangan terjadi peningkatan setiap tahunnya, yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan, serta musim yang tidak mendukung untuk budidaya komoditas tertentu.

b. Distribusi Komoditas Strategis Pangan

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan empat pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badan, Pelabuhan Sape dan Pelabuhan Bima. Jumlah komoditas pangan yang masuk dan keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2011, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Arus Komoditas Pangan Masuk dan Keluar
dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2011

No	Komoditi/ Tahun	Masuk (Ton)	Keluar (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beras			
	2009	-	45.384	Masuk dari : Vietnam, Surabaya, Jember, Ujung Pandang Keluar ke : Ende, Jatim, Bali, Surabaya, Jember, NTT, Flores, Banjarmasin, Waingapu, Makassar
	2010	269	39.287	
	2011	13.393	31.311	
	Peningkatan Pertahun (%)	4.878,8	-16,87	
2	Jagung			
	2009	40	107.699	Masuk dari : Jatim, Kupang Keluar ke : Ende, Jatim, Bali, Malang, Sidoarjo, Banyuwangi, Pasuruan, Malang Jember, Lumajang, Kediri, Banjarmasin, Waingapu, Flores, Kutai, Makassar, Kupang, Ende, Samarinda
	2010	500	37.822	
	2011	240	58.130	
	Peningkatan Pertahun (%)	549,0	-5,59	
3	Kedelai			
	2009	425	3.297	Masuk dari : Surabaya, Jember Keluar ke : Jatim, Banjarmasin, Makassar, Maumere, Flores, Lamongan, Ruteng
	2010	849	9.853	
	2011	7.349	7.838	
	Peningkatan Pertahun (%)	432,69	89,20	
4	Bawang Merah			
	2009	102	974	Masuk dari : Jatim, Brebes, Pati, Probolinggo, Malang, Banyuwangi, Klungkung, Mojokerto, Karangasem, Batu, Cirebon, Telogomas Keluar ke : Maumere, Makassar, Banjarmasin, Jatim, Ende, Waingapu, Bali, Sumba, Flores, Surabaya, Papua, Timika, Selayar, Bau, Surabaya, Kendari, Maluku, Tarakan, Kupang, Jakarta
	2010	236	23.438	
	2011	569	23.516	
	Peningkatan Pertahun (%)	136,24	1.153,35	
5	Bawang Putih			
	2009	1.616	57	Masuk dari : Jatim, Malang, Mojosari, Mojokerto, Probolinggo,
	2010	905	92	

No	Komoditi/ Tahun	Masuk (Ton)	Keluar (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2011	1.281	27	Malang, Klngkung, Banjarnegara, Bali
	Peningkatan Pertahun (%)	-1,23	-4,62	Keluar ke : Flores, Sumba, Maumere, Waikelo, Ruteng
6	Cabai			
	2009	208	40	Masuk dari : Jatim, Bali, NTT, Sulteng, Bali, Manado, Palu, Pontianak, Sumba, Jambi, Banyuwangi, Cirebon, Makassar, Kediri, Malang Keluar ke : Jakarta, Batam, Pangkal Pinang, Pekan Baru, Kupang, Batam, Surabaya, Bandung, Makassar, Ambon, Tarakan
	2010	176	259	
	2011	164	1.186	
	Peningkatan Pertahun (%)	-11,1	452,71	
7	Kacang Tanah			
	2009	45	200	Masuk dari : Batu, Malang Keluar ke : Banyuwangi, Banjarmasin, Makassar, Solo, Malang, Ambon, Flores, Polewali
	2010	39	677	
	2011	25	1.886	
	Peningkatan Pertahun (%)	-24,62	208,54	
8	Kacang Hijau			
	2009	0	125	Masuk dari : Jatim, Malang, Pare, Kediri Keluar ke : Surabaya, Banjarmasin, Bali, Tenggara, Makassar, Lampung
	2010	75	424	
	2011	17	570	
	Peningkatan Pertahun (%)	-77,33	136,82	
9	Tepung Terigu			
	2009	538	0	Masuk dari : Jatim, Bali, Makassar, Tanjung Priok, Surabaya Keluar ke : NTT
	2010	5.887	0	
	2011	23.935	33	
	Peningkatan Pertahun (%)	650,41		
10	Minyak Goreng			
	2009	-	-	Masuk dari : Surabaya Keluar ke : -
	2010	-	-	
	2011	28.336	-	
	Peningkatan Pertahun (%)			
11	Daging Ayam			
	2009	0	0	Masuk dari : Jatim

No	Komoditi/ Tahun	Masuk (Ton)	Keluar (Ton)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2010	114	0	Keluar ke : Makassar
	2011	6.028	4	
	Peningkatan Pertahun (%)	5.187,7		
12	Telur Ayam			
	2009	0	0	Masuk dari : Jatim Keluar ke : NTT
	2010	45	0	
	2011	29.881	3	
	Peningkatan Pertahun (%)	66.302,2		
13	Sapi Potong			
	2009	0	8.323	Masuk dari : Jakarta Keluar ke : Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Kalimantan, Tanah Toraja, Palangkaraya, Makassar, Bulukumba, Surabaya, Flores, Sumba, Jakarta
	2010	120	19.508	
	2011	0	26.411	
	Peningkatan Pertahun (%)		84,89	
14	Kerbau Potong			
	2009	0	5.843	Masuk dari : Sulawesi Selatan Keluar ke : Banjarmasin, Balikpapan, Jeneponto, Surabaya, Kalimantan, Bulukumba, Tanah Toraja, Palangkaraya, Makassar, Flores, Jakarta
	2010	10	6.428	
	2011	0	8.203	
	Peningkatan Pertahun (%)		18,81	

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

c. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Dalam rangka menja stabilisasi harga gabah ditingkat petani, sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB telah menyalurkan bantuan sosial kepada 42 gapoktan. Penyaluran bansos masing-masing sebesar Rp.225.000.000,- diarahkan pada daerah sentra produksi pertanian tanaman padi. Adapun penyaluran bansos Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM) di NTB dalam berbagai tahap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Tahapan Penyaluran Bansos Gapoktan LDPM Provinsi NTB
Tahun 2009-2012

No	Kabupaten / Kota	Tahapan Gapoktan LDPM				Jml
		Penumbuhan	Pengembangan	Mandiri	Pasca Mandr	
1	Lombok Barat	-	-	2	-	2
2	Lombok Tengah	2	2	1	4	9
3	Lombok Timur	2	2	2	4	10
4	KSB	1	1	-	2	4
5	Sumbawa	2	1	-	4	7
6	Dompu	1	1	-	3	5
7	Kota Bima	1	1	-	1	3
8	Bima	-	-	-	2	2
	Jumlah	9	8	5	20	42

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Penyaluran bansos dimaksudkan untuk menstabilkan harga gabah/beras ditingkat petani pada saat panen raya. Jumlah gapoktan yang telah mendapatkan dana bansos pada masing-masing kabupaten/kota belum sebanding dengan jumlah produksi padi yang dihasilkan.

3. Konsumsi Pangan dan Gizi

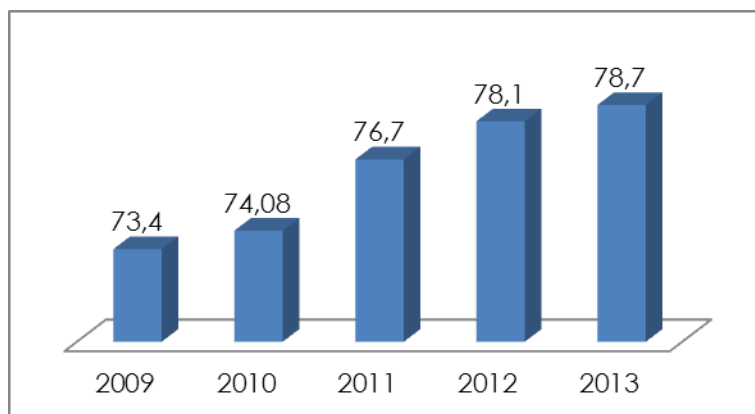
Beberapa indikator yang menjadi ukuran pencapaian kinerja konsumsi pangan dan gizi selama lima tahun terakhir disampaikan sebagai berikut :

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan pemanfaatan pangan lokal sebagai

alternatif bahan pangan khususnya sumber karbohidrat dapat mengurangi permintaan terhadap beras dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui asupan pangan yang beranekaragam. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat selama periode tahun 2008-2013 mengalami peningkatan sebesar 1,36 % pertahun, dengan Skor PPH tahun 2013 sebesar 78,7 (98%) dibawah target yang ditetapkan 78,7. Skor PPH ini masih jauh dari kondisi ideal yaitu nilai PPH 100. Perkembangan capaian Skor PPH Provinsi NTB tahun 2008-2013 disajikan gambar berikut

Gambar 3.3
Perkembangan Skor PPH Provinsi NTB Tahun 2009-2013

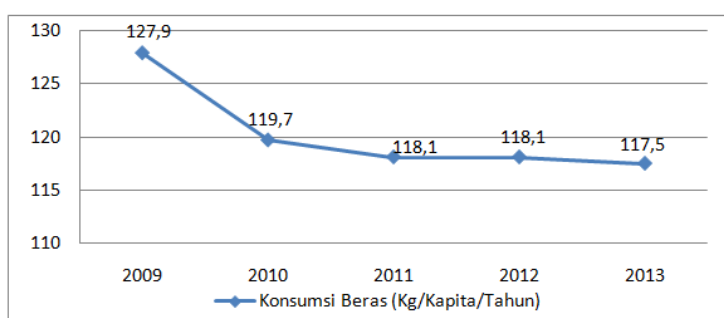


Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Salah satu penyebab rendahnya skor PPH adalah masih tingginya tingkat konsumsi beras. Konsumsi beras penduduk NTB tahun 2013 mencapai 117,5 kg/kapita/tahun lebih tinggi dari konsumsi beras ideal sebesar 100,3 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi beras penduduk NTB tahun 2008-2013 mengalami penurunan rata-rata 0,6

kg/kapita/tahun, dibawah target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 kg/kapita/tahun. Perkembangan konsumsi beras penduduk NTB tahun 2008-2013 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB
Tahun 2008-2013



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Sedangkan kualitas konsumsi aktual penduduk NTB tahun 2013 dibandingkan dengan konsumsi ideal untuk setiap kelompok pangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB
Tahun 2013

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal		Konsumsi Aktual 2013		Skor PPH 2013
		(gr/kap/hari)	(kg/kap/thn)	(gr/kap/hari)	(kg/kap/thn)	
1	Padi-padian	275	100,3	396,0	144,5	25
	Beras			322,0	117,5	
2	Umbi-umbian	100	36,5	21,6	7,9	0,7
3	Pangan Hewani	150	54,8	114,6	41,8	18,3
4	Minyak dan Lemak	20	7,3	15,6	5,7	3,5
5	Buah/Biji Berminyak	10	3,7	5,4	2,0	0,7
6	Kacang-kacangan	35	12,8	21,2	7,7	7,3

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal		Konsumsi Aktual 2013		Skor PPH 2013
		(gr/kap/hari)	(kg/kap/thn)	(gr/kap/hari)	(kg/kap/thn)	
7	Gula	30	11	17,0	6,2	1,5
8	Sayur dan Buah	250	91,3	260,6	95,1	21,6
9	Lain-lain	-	-	57,8	21,1	-
JUMLAH						78,7

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Tingkat konsumsi energi penduduk Provinsi NTB tahun 2009-2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Konsumsi Energi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2009-2012

No	Komponen	Konsumsi Energi dan % konsumsi Energi				Peningkatan Per tahun (%)
		2009	2010	2011	2012	
1.	Konsumsi energi (Kkal/kap/hr)	2.004	2.036	2.009	2.011	0,14
2.	% Konsumsi Energi (AKG/E)	100,2	101,8	100,5	100,55	0,16

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

b. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan dst) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. Nantinya diharapkan penduduk dapat mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan

bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Selain itu, KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.

Kegiatan ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga.

Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam. Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit bagi

anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Perkembangan jumlah KRPL di Provinsi NTB Tahun 2010-2013 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perkembangan Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kegiatan P2KP di Provinsi NTB Tahun 2010-2013

Tahun	Desa	Jumlah Anggota (orang)	Konsep
2010	50	500	P2KP
2011	100	1.000	P2KP
2012	50	500	P2KP
2013	82	2.460	KRPL
Jumlah	282	4.460	

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

c. Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pemantauan keamanan pangan produk buah dan sayur segar melalui Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTB BPSMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan pengujian terhadap produk buah dan sayur segar. Pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan pada setiap rantai proses produksi pangan segar yang meliputi proses produksi buah dan sayuran serta pengawasan dan monitoring residu pestisida pada penanganan buah dan

sayuran setelah dipanen. Hasil uji laboratorium produk buah dan sayur segar terhadap kandungan pestisida dan logam berat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Hasil Analisis Residu Pestisida dan Logam Beras
Komoditas Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010-2013

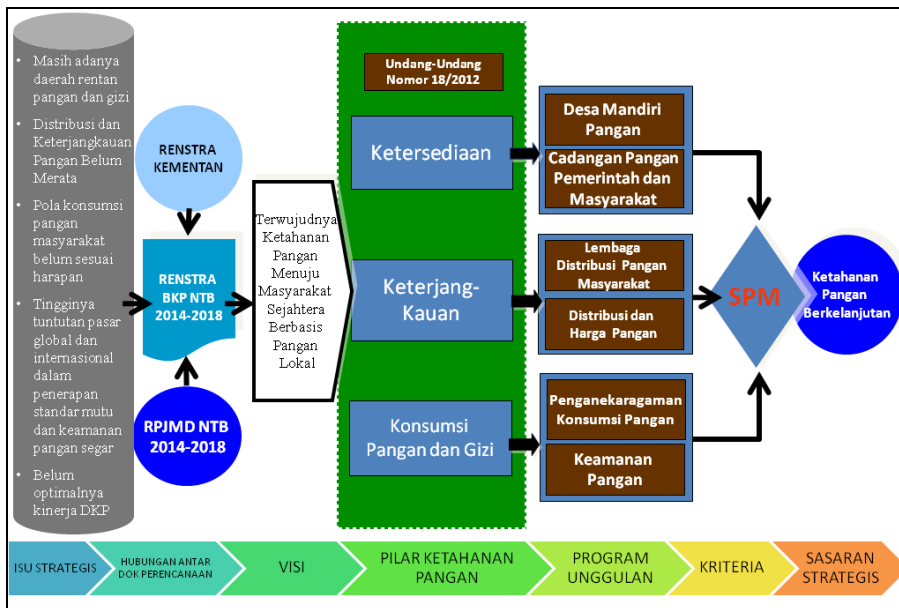
NO	TAHUN	JENIS	HASIL UJI	KETERANGAN	LOKASI
1	2010	Jeruk Pamento	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Sumbawa
2	2010	Jeruk Grape Fruit	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Sumbawa
3	2010	Melon	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Desa Ganti, Kab. Loteng
4	2011	Manggis	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Lingsar, Kab. Lobar
5	2011	Mangga Gedong Gincu	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Bayan, KLU
6	2012	Bawang Merah	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Doro Pica, Kab. Bima
7	2012	Bawang Putih	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Semabalun, Kab. Lotim
8	2012	Buah Naga	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Desa Prine, Kab. Loteng
9	2012	Kentang	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Semabalun, Kab. Lotim
10	2012	Melon	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Kab. Loteng
11	2012	Bawang Merah	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Parewa Mulia Kab. Bima
12	2013	Bawang Merah	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Ds. Brang Kolong Kab. Bima
13	2013	Kangkung	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman	Desa Bug-bug Kab. Lobar

NO	TAHUN	JENIS	HASIL UJI	KETERANGAN	LOKASI
14	2013	Melon Golden Apollo	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman Aman	Ds. Lepak Kab. Lotim
15	2013	Melon Red Sonya	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman Aman	Ds. Lepak Kab. Lotim
16	2013	Nenas	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman Aman	Ds. Jurit Kab. Lotim
17	2013	Cabe Merah Besar	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman Aman	Ds. Banjar Kab. Sumbawa Barat
18	2013	Cabe Rawit	Dibawah ambang batas	Aman/Tidak Aman Aman	Ds. Kalampa Kab. Bima

3.3. Analisis Isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis yang masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pembangunan ketahanan pangan daerah antara lain : 1) Masih adanya daerah rentan pangan dan gizi, 2) Distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata, 3) Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan, 4) Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar, dan 5) Belum optimalnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan. Kerangka strategis dalam rangka penanganan isu tersebut, program unggulan serta kriteria dalam rangka pencapaian sasaran strategis ketahanan pangan yang berkelanjutan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Kerangka Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan
Provinsi NTB Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Isu strategis terkait ketahanan pangan di Provinsi NTB yang sampai saat ini masih dirasakan dan memerlukan berbagai langkah strategis dalam penangganya kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih Adanya Daerah Rentan Pangan dan Gizi

Pemetaan situasi ketahanan pangan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTB yang dilakukan terakhir pada tahun 2010 merupakan hasil kerjasama Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan *World Food Programme* (WFP) menunjukkan bahwa terdapat 64 kecamatan dengan resiko rentan terhadap kerawanan pangan dan 41 Kecamatan tahan terhadap kerawanan pangan. Jumlah kecamatan berdasarkan prioritas penanganan yang diperlukan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Jumlah Kecamatan Rentan Pangan

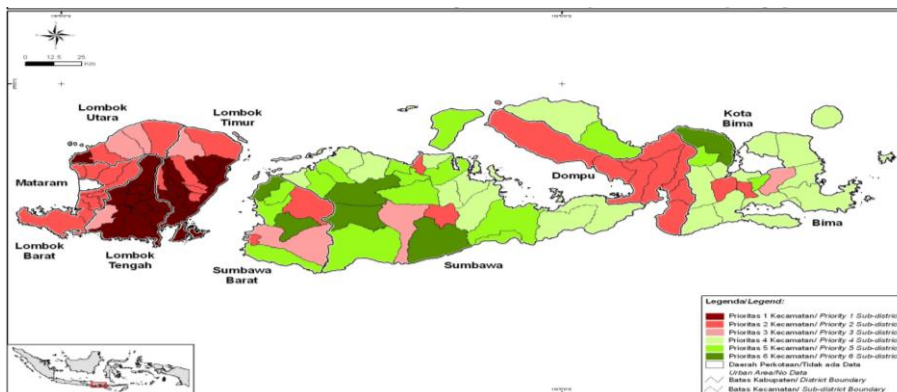
Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan					
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
1	Lombok Barat		10				
2	Lombok Tengah	11		1			
3	Lombok Timur	14	5	1			
4	Lombok Utara	1	2	2			
5	Sumbawa Barat		2	1		3	2
6	Sumbawa		2	1	9	9	3
7	Dompu		8				
8	Kab. Bima		2	1	11	3	1
	Jumlah	26	31	7	20	15	6

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2013

Gambaran situasi ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi NTB Tahun 2010 disajikan pada peta berikut.

Gambar 3.5
Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan
(Food Security and Volnerability Atlas / FSVa Tahun 2010)



Kedepan masih diperlukan berbagai upaya melalui penerapan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mengatasi kecamatan yang memiliki resiko tinggi terhadap kejadian rentan pangan yang disesialkan dengan faktor penyebabnya. Indikator yang dijadikan ukuran untuk mengetahui situasi ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi NTB tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Kondisi Ketahanan Pangan
Berdasarkan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2010

Kab	Keterediaan	Kemiskinan	Ketersediaan Listrik	Akses Jalan	Buta Huruf	Angka Harapan Hidup	Status Kesehatan Balita	Sarana Kesehatan	Air Bersih
Lobar	0.64	24.02	10.29	0.00	30,33	59.97	22.07	1.14	11.33
Loteng	0.41	20.94	14.49	0.81	36,48	60.24	17.32	2.42	22.86
Lotim	0.52	23.96	25.86	0.00	29,22	59.70	22.49	0.84	22.70
KLU	0.46	*)	12.56	3.03	35,25	*)	23.08	9.09	18.56
Sumbawa	0.18	23.85	4.26	8.48	16,19	60.51	20.24	4.24	7.39
Dompu	0.23	21.76	23.06	0.00	23,67	60.83	16.35	0.00	10.20

Bima	0.24	20.42	11.79	5.08	20.17	62.31	24.84	3.39	13.54
KSB	0.24	24.34	4.81	8.16	15.74	60.94	12.39	6.12	4.16
Provinsi	0.35	22.78	14.63	3.18	27.03	61.50	23.70	2.63	15.92

2. Distribusi dan Keterjangkauan Pangan Belum Merata

Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi dan distribusi yang cukup beragam, mulai dari jenis transportasi darat, laut dan udara. Banyaknya pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan masih adanya beberapa wilayah yang memiliki akses jalan terbatas, serta daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan penyediaan pangan secara mandiri membutuhkan perhatian serius daerah Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut berbagai program dan kegiatan telah dilakukan, antara lain untuk mengatasi permasalahan akses jalan, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan kualitas jalan serta membuka akses jalan baru serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan yang didasarkan pada kearifan lokal terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat.

Distribusi komoditas pangan antar Provinsi juga menjadi perhatian, tingginya arus keluar dan masuk komoditas strategis pangan dari dan menuju Provinsi NTB menuntut adanya pengawasan yang ketat, terutama untuk komoditas pangan pokok. Kualitas beras dari Provinsi NTB yang sangat baik menjadikan minat dari para pedagang luar daerah untuk membeli sangat besar, sehingga dikhawatirkan ketersediaan

indikator keluarga prasejahtera merupakan penyebab utama masih adanya daerah rentan pangan di sebagian besar di Provinsi NTB.

Selain hal tersebut upaya untuk menjamin keterjangkauan pangan masyarakat, dilakukan melalui stabilisasi harga pangan pokok. Memberikan jaminan harga yang layak bagi petani melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, sehingga petani sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen dapat memiliki daya beli yang cukup, informasi harga pangan diberikan tepat waktu sehingga perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah yang lain dan daerah sentra dan non sentra tidak sering terjadi dalam rangka menjamin konsumen memperoleh harga yang wajar. Selain upaya tersebut

Kemampuan masyarakat untuk dapat menyediakan pangan setiap saat juga menjadi permasalahan yang masih dihadapi terutama didaerah bukan sentra pangan, hal ini coba diatasi dengan pengembangan lumbung pangan masyarakat, dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola cadangan pangan untuk tersedia setiap waktu.

3. Pola konsumsi Pangan Masyarakat Belum Sesuai Harapan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Provinsi NTB berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Skor PPH Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 78,7 dibawah kondisi idela sebesar 100. Masih tingginya konsumsi beras dan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat menyebabkan belum tercapainya kualitas konsumsi pangan yang baik. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pola

konsumsi pangan masyarakat dilakukan melalui gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

4. Tingginya Tuntutan Pasar Global dan Internasional Dalam Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Segar

Produk yang aman dan bermutu saat ini menjadi tuntutan utama berbagai pihak, baik pasar domestik maupun internasional. Keamanan produk buah dan sayur segar selama ini masih menjadi salah satu masalah yang perlu ditangani secara serius. Masih banyaknya produk pertanian yang beredar dipasaran yang belum memenuhi standar keamanan pangan akibat dari belum diterapkannya sistem usaha tani yang baik.

Tuntutan akan adanya status jaminan kepastian produk pertanian bermutu maupun aman menjadi prioritas utama dalam perdagangan produk-produk pertanian secara luas. Kondisi tersebut menjadikan kepastian mutu dan keamanan pangan sebagai salah satu parameter daya saing produk pertanian. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dipasar domestik maupun internasional perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat kelancaran produk maupun pemasaran komoditas pangan hasil pertanian.

Dalam Upaya meningkatkan daya saing produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan sistim jaminan/manajemen mutu dan keamanan pangan produk (*food safety*) agribisnis terutama untuk produk segar adalah sangat penting dan menjadi suatu keharusan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran konsumen semakin meningkat terhadap keamanan pangan produk terutama produk segar, yang semakin mendorong meningkatnya

permintaan terhadap produk yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan.

Untuk menghasilkan produk bermutu dan aman untuk dikonsumsi diperlukan suatu sistem keamanan pangan yang sesuai dengan sistem keamanan pangan dinegara lain sehingga ada saling pengakuan/keberterimaan produk yang dihasilkan.

Pengembangan sistem jaminan mutu keamanan pangan produk pertanian khususnya buah dan sayur segar, harus berorientasi dan menyeluruh dari hulu sampai hilir yang dimulai dari *on-farm* hingga *off-farm*. Untuk menunjang pengembangan sistem tersebut, implementasi GAP, GHP/GMP, GDP dan GRP merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan.

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga perlu dilakukan cara-cara penanganan pasca panen dan pengolahan produk pertanian yang baik dan benar serta berorientasi pada penerapan teknologi sehingga dapat meningkatkan mutu serta keamanan pangan.

Dengan dilaksanakannya hal tersebut diharapkan dapat :

- a) Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan buah dan sayur segar yang dikonsumsi memiliki mutu baik dan aman untuk dikonsumsi,
- b) Meningkatkan daya saing produk, sehingga produk yang dihasilkan memiliki posisi tawar yang lebih baik,
- c) Meningkatkan perekonomian para pelaku usaha buah dan sayur segar.

5. Belum Optimalnya Kinerja Dewan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dijelaskan bahwa Badan

Ketahanan Pangan secara Ex-officio merupakan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan yang memiliki fungsi koordinasi maka Badan Ketahanan Pangan telah melakukan rapat melalui Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Disamping Rapat Koordinasi DKP telah dilakukan rapat Pokja Ahli DKP membahas isu-isu strategis ketahanan pangan.

Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan khususnya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis sangat diperlukan. Sampai saat ini kinerja Dewan Ketahanan Pangan masih perlu ditingkatkan terkait penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan ketahanan pangan di daerah.

3.4. Analisa Lingkungan Strategis

Proses dalam rangka menyusun faktor penentu keberhasilan diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis merupakan upaya menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

Tujuan dan peran analisis lingkungan adalah untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan faktor-faktor yang berada

di luar maupun di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal.

1. **Analisis Lingkungan Eksternal** adalah aktivitas analisis tentang dimensi peluang (O) dengan ancaman (T), mencakup pemahaman berbagai faktor di luar organisasi yang mengarah pada munculnya kesempatan bahkan ancaman bagi organisasi. Di dalam analisis lingkungan eksternal berupaya memilah permasalahan yang dihadapi dalam bentuk, fungsi dan keterkaitan antar bagian. Bagi pengembangan strategis, analisis ini di butuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis kesempatan dan ancaman saja tetapi juga untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisis itu di pergunakan. Oleh karena itu pimpinan puncak membutuhkan diagnosis lebih lanjut atas hasil analisis lingkungan eksternal.
Analisis
2. **Analisis Lingkungan Internal** dalam bingkai SWOT analisis merupakan uraian tentang dimensi kekuatan (S) dan kelemahan (W) dalam sebuah organisasi
3. **Analisis Strategi Pilihan.** Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threat*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

- a. **Strategi S-O** dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin,
- b. **Strategi W-O** dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada,
- c. **Strategi S-T** dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang, untuk selanjutnya masing-masing strategi pilihan tersebut diuji relevansinya dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi.

Memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, telah dirumuskan hasil identifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Identifikasi Lingkungan Internal dan Eksternal
Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB

NO	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN INTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTH)	
1	Adanya Juklak, Juknis, Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) dan Dokumen Perencanaan
2	Adanya Dukungan Dana / Anggaran

NO	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN
3	Adanya data dan informasi ketahanan pangan
4	Adanya Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja
5	Adanya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
KELEMAHAN (WEAKNESS)	
1	Lemahnya Manajemen Kelembagaan
2	Kurangnya SDM / Aparat (kuantitas dan kualitas)
3	Terbatasnya sarana dan prasarana
4	Belum adanya Satlak SPI
5	Belum optimalnya pelaksanaan SOP
LINGKUNGAN EKSTERNAL	
PELUANG (OPPORTUNITY)	
1	Adanya Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan
2	Adanya Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat (LDPM/Demapan/Pelaku Usaha/Lumbung/KRPL, dll)
3	Adanya Permintaan Produk Aman semakin meningkat
4	Adanya MoU/Kerjasama antara BKP dengan pihak lain
5	Adanya PPL/Pendamping
ANCAMAN (THREAT)	
1	Tingkat kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah
2	Rendahnya daya beli masyarakat.
3	Kurangnya pemahaman penyuluh tentang pelaksanaan kegiatan
4	Distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata
5	Banyaknya Kelompok yang tidak berlanjut pasca pendampingan

Berdasarkan hasil identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal, dirumuskan beberapa strategi alternatif yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB periode 2014-2018. Alternatif strategi Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Strategi Alternatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Tahun 2014-2018

	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
EKSTERNAL	Adanya Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	Tingkat kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah
INTERNAL	Adanya Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat (LDPM/Demapan/Pelaku Usaha/Lumbung/KRPL, dll)	Rendahnya daya beli masyarakat.
	Adanya Permintaan Produk Aman semakin meningkat	Kurangnya pemahaman penyuluh tentang pelaksanaan kegiatan
	Adanya MoU/Kerjasama antara BKP dengan pihak lain	Distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata
	Adanya PPL/Pendamping	Banyaknya Kelompok yang tidak berlanjut pasca pendampingan
KEKUATAN (S)	LANGKAH STRATEGI (SO)	LANGKAH STRATEGI (ST)
Adanya Juklak, Juknis, Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) dan Dokumen Perencanaan	Dayagunakan Juklak, Juknis, Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) dan Dokumen Perencanaan untuk mengoperasionalkan Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	Dayagunakan Juklak, Juknis, Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) dan Dokumen Perencanaan untuk mengatasi tingkat kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah
Adanya Dukungan Dana / Anggaran	Dayagunakan Dukungan Dana / Anggaran untuk memanfaatkan Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat (LDPM/Demapan/Pelaku Usaha/Lumbung/KRPL, dll)	Manfaatkan Dukungan Dana / Anggaran untuk mengatasi Banyaknya Kelompok yang tidak berlanjut pasca pendampingan
Adanya data dan informasi ketahanan pangan	Dayagunakan data dan informasi ketahanan pangan untuk memenuhi permintaan Produk Aman semakin yang meningkat	Manfaatkan data dan informasi ketahanan pangan untuk mengatasi Distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata
Adanya Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja	Manfaatkan Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja untuk memanfaatkan Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	Manfaatkan Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja untuk mengatasi Kurangnya pemahaman penyuluh tentang pelaksanaan kegiatan

Adanya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan	Manfaatkan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan untuk mengoperasionalkan MoU/Kerjasama antara BKP dengan pihak lain	Manfaatkan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan untuk mengatasi tingkat kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah
KELEMAHAN (W)	LANGKAH STRATEGI (WO)	LANGKAH STRATEGI (WT)
Lemahnya Manajemen Kelembagaan	Atasi Lemahnya Manajemen Kelembagaan dengan memanfaatkan Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	Minimalkan Lemahnya Manajemen Kelembagaan dan Distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata
Kurangnya SDM / Aparat (kuantitas dan kualitas)	Atasi Kurangnya SDM / Aparat (kuantitas dan kualitas) dengan memanfaatkan PPL/Pendamping	Minimalkan Kurangnya SDM / Aparat (kuantitas dan kualitas) dan Banyaknya Kelompok yang tidak berlanjut pasca pendampingan
Terbatasnya sarana dan prasarana	Atasi Terbatasnya sarana dan prasarana dengan memanfaatkan Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat (LDPM/Demapan/Pelaku Usaha/Lumbung/KRPL, dll)	Minimalkan Terbatasnya sarana dan prasarana dan Tingkat kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah
Belum adanya Satlak SPI	Atasi Belum adanya Satlak SPI dengan Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	Minimalkan Belum adanya Satlak SPI dan Tingkat kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah
Belum optimalnya pelaksanaan SOP	Atasi Belum optimalnya pelaksanaan SOP dengan Adanya Regulasi dan Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	Minimalkan Belum optimalnya pelaksanaan SOP dan Banyaknya Kelompok yang tidak berlanjut pasca pendampingan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB 2014-2018, tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2014-2018 seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2014, yaitu “**Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera**”.

Mengacu pada visi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka ditetapkan visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2014-2018 adalah **“Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat Sejahtera Berbasis Pangan Lokal”**.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan kewaspadaan pangan dan gizi
- b. Meningkatkan kerawanan pangan
- c. Meningkatkan keterjangkauan dan kestabilan harga pangan
- d. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat
- e. Meningkatkan keamanan pangan segar
- f. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal

4.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dari misi yang ditetapkan adalah :

- a. Terwujudnya kemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian ditingkat rumah tangga
- b. Meningkatkan penanganan rawan pangan
- c. Memperkuat distribusi dan cadangan pangan
- d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan

- e. Meningkatkan penanganan keamanan pangan dan mutu pangan segar
- f. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal

2. Sasaran

Sasaran dari tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis pangan lokal
- b. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
- c. Stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen
- d. Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah dan rumah Tangga
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
- f. Peningkatan keamanan pangan segar yang aman dan bermutu
- g. Meningkatkan efektivitas pelayanan internal

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan di Provinsi NTB adalah :

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian ditingkat rumah tangga
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan tingkat desa dan rumah tangga
3. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan

4. Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5. Koordinasi lintas Kabupaten/Kota dan jejaring keamanan pangan
6. Sertifikasi prima 3 dan 2, buah dan sayur segar
7. Sosialisasi tentang pentingnya pangan segar yang bermutu dan aman
8. Koordinasi pelaksanaan program ketahanan pangan

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pencapaian visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2014-2018 yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat NTB yang Sejahtera", akan dicapai melalui program, kegiatan terobosan yang telah dirumuskan bersama oleh seluruh pejabat dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Program prioritas, kegiatan terobosan dan indikator pencapaian target kinerja tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Program Prioritas, Kegiatan Terobosan Dan Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018

NO.	ISU STRATEGIS	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014-2018	KEGIATAN TEROBOSAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA 2018	SKPD TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Masih adanya daerah rentan pangan dan gizi	Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian ditingkat rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantauan daerah rentan pangan dan gizi ▪ Pemantapan Kegiatan Desa Mandiri Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpantaunya daerah rentan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ▪ Terpenuhinya kebutuhan dan kemandirian pangan di tingkat desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 Kecamatan ▪ 120 Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pertanian ▪ Dinas Peternakan ▪ Dinas Perkebunan ▪ Bakortuh ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas Sosial ▪ BPMPD ▪ BPS ▪ BP3AKB

NO.	ISU STRATEGIS	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014-2018	KEGIATAN TEROBOSAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA 2018	SKPD TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
					▪		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biro Ekonomi ▪ Biro Kerjasama ▪ Biro Kessos
2	Distribusi dan Keterjangkauan Pangan Belum Merata	Meningkatkan keterjangkauan pangan tingkat desa dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantauan harga pangan termasuk di daerah pariwisata dan kepulauan ▪ Stabilisasi harga pangan ▪ Pemenuhan cadangan pangan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya laporan informasi harga, pasokan dan akses pangan ▪ Berkembangnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) ▪ Terpantainya arus distribusi pangan di pintu keluar masuk pelabuhan ▪ Terpenuhinya cadangan pangan pemerintah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14 Komoditas ▪ 27 Gapoktan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) ▪ 8 Pelabuhan ▪ 357 Ton beras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perindag, ▪ Bulog, ▪ Dinas Perhubungan, ▪ Dinas Pertanian, ▪ Syahbandar Pelabuhan Bima, ▪ Pasar Induk/Pasar Raya Kab/Kota, ▪ BPOM, ▪ Bakorluh, ▪ Perbankan, ▪ Dinas Koperasi ▪ Dinas Pariwisata ▪ Biro Ekonomi ▪ ASDP ▪ Pengusaha ▪ Karantina Kelas I Mataram ▪ Karantina Kelas I Sumbawa, Badas dan Sape ▪ Pemenuhan cadangan pangan pemerintah

NO.	ISU STRATEGIS	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014-2018	KEGIATAN TEROBOSAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA 2018	SKPD TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
3	Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Sosialisasi Pola Pangan Harapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) ▪ Pengembangan pangan lokal ▪ Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Rumah Pangan Lestari ▪ Tumbuhnya industri Rumah Tangga pengolahan pangan berbasis pangan lokal ▪ Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> 652 Kawasan ▪ 100 Industri Rumah Tangga (IRT) ▪ 5.500 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan ▪ Dinas Perindag, ▪ Dinas Pertanian, ▪ Dinas Koperasi ▪ Dinas Peternakan ▪ Dinas Kel & Perik ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas Perkebunan ▪ TP PKK ▪ BPOM ▪ BPS
4.	Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi lintas Kabupaten/ Kota dan jejaring keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Peningkatan Diversifikasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Fasilitas dan sumberdaya laboratorium uji keamanan pangan segar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya Laboratorium Uji Pangan Segar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pertanian, ▪ Dinas Perkebunan ▪ Dinas Peternakan ▪ Dinas Kehutanan ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Karantina

NO.	ISU STRATEGIS	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014-2018	KEGIATAN TEROBOSAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA 2018	SKPD TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
	standar mutu dan keamanan pangan segar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikasi prima 3 dan 2, buah dan sayur segar ▪ Sosialisasi yang terus menerus tentang pentingnya pangan segar yang bermutu dan aman 	Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan ▪ Sertifikasi Komoditas Potensial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pengujian keamanan pangan buah dan sayur segar ▪ Tercapainya standar mutu dan keamanan pangan segar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 Komoditas ▪ 50 Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan ▪ BPOM ▪ Bakorluh ▪ PU ▪ BLHP
5	Belum optimalnya kinerja kelembagaan ketahanan pangan	Peningkatan koordinasi pelaksanaan program ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Ketahanan Pangan ▪ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pelaksanaan program ketahanan pangan ▪ Perbaiki Sistem pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumusan kebijakan ketahanan pangan ▪ Pembuatan SOP Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Kebijakan ▪ 1 SOP 	SKPD Anggota Dewan Ketahanan Pangan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2014-2018, difokuskan pada upaya “memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, **peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan**, serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi”.

Untuk mencapai visi pembangunan Provinsi NTB, prioritas pembangunan daerah tahun 2014-2018 di prioritaskan pada penanganan : 1) budipekerti luhur, 2) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, 3) stabilitas keamanan dan ketertiban umum, 4) pendidikan, 5) kesehatan, 6) masalah kesejahteraan sosial, 7) **ketahanan pangan**, 8) penanggulangan kemiskinan, 9) industri olahan dan ekonomi kreatif, 10) pariwisata, 11) investasi dan wirausaha, 12) infrastruktur dan konektivitas wilayah, dan 13) lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2014-2018, Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB mendukung pencapaian misi ke lima yaitu **“meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah”**. Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar

berbasis potensi unggulan lokal. Menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah, mengembangkan industri kecil dan menengah yang telah ada bagian penting memajukan ekonomi kerakyatan. Era industrialisasi berbasis pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas. Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri, peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan. Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran.

Dalam rangka pencapaian misi kelima RPJMD Provinsi NTB, Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB mendukung pencapaian tujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan sasaran termemanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Langkah terobosan pencapaian misi kelima tersebut adalah "**Gerakan Membangun Masyarakat Sejahtera (GEMAMATRA)**", dengan indikator pencapaian misi : 1) pertumbuhan ekonomi, 2) angka kemiskinan, 3) tingkat pengangguran terbuka, 4) **Pola Pangan Harapan (PPH)**, 5) paritas daya beli, 6) pertumbuhan PAD, dan 7) laju investasi.

Target pencapaian indikator Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program Prioritas Pembangunan dan Kebutuhan Indikatif Pendanaan
APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Tahun 2013-2018

No	Urusan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018	
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)
A.	URUSAN WAJIB											
21	Ketahanan pangan											
	Peningkatan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	81,8	4.981.171	83,3	5.455.380	86,3	5.974.732	87,8	6.543.526	89,4	7.166.470

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB merupakan pedoman bagi seluruh pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, beserta seluruh peraturan yang mengikutinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2014-2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).